

## Integrasi Tata Kelola Keuangan Sektor Publik: Analisis Strategis Perencanaan, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Ririn Yolanda Manalu<sup>1</sup>, Ariel Parulian siregar<sup>2</sup>, Refa Lina Br. Sinaga<sup>3</sup>, Putri Dewi Kemala Lubis<sup>4</sup>,  
Khairani Alawiyah Matondang<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia Alamat:  
Jl. William Iskandar Ps. V Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,  
Kode Pos 20221

Email :[ririnmanalu69@gmail.com](mailto:ririnmanalu69@gmail.com)

\* Corresponding Author

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5421>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 4 April 2026

#### Kata Kunci:

Akuntansi Sektor  
Publik, APBD,

Anggaran Berbasis Kinerja,  
Akuntabilitas, Pelaporan  
Keuangan, Good Governance.

#### Keywords:

Public Sector Accounting,  
Regional Budget,  
Performance-Based  
Budgeting, Accountability,  
Financial Reporting, Good  
Governance



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi tata kelola keuangan sektor publik melalui tinjauan komprehensif terhadap siklus perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan pemerintah. Fokus utama kajian meliputi evaluasi efektivitas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), implementasi anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), serta pengaruh standar pelaporan akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kritis terhadap berbagai hasil penelitian empiris serta normatif di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinkronisasi antar dokumen perencanaan merupakan fondasi utama efektivitas anggaran, sementara penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi alokasi sumber daya publik. Selain itu, pengawasan kualitas pelaporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya komitmen manajerial dan kepatuhan terhadap standar regulasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem akuntansi sektor publik yang terintegrasi.

*This study aims to analyze the integration of public sector financial governance through a comprehensive understanding of the government's planning, budgeting, and financial reporting cycles. The main focus of the study includes evaluating the effectiveness of Regional Budget (APBD) planning, the implementation of performance-based budgeting, and the influence of accounting reporting standards on the accountability of government agencies. The methods used are literature review and critical analysis of various empirical and normative research results in both central and regional governments. The analysis results indicate that synchronization between planning documents is the main foundation of budget effectiveness, while the implementation of performance-based budgeting has consistently been shown to increase transparency and efficiency in public resource allocation. In addition, simultaneous monitoring of the quality of financial reporting has a significant effect on strengthening government performance accountability. The study's conclusions emphasize the importance of managerial commitment and compliance with regulatory standards in realizing good governance through an integrated public sector accounting system.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Ririn Yolanda Manalu et al (2026). Integrasi Tata Kelola Keuangan Sektor Publik: Analisis Strategis Perencanaan, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5421>

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dan pusat memegang peranan krusial dalam mengelola sumber daya publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang tertuang dalam instrumen anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan, prioritas program, dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan luas yang diberikan kepada pemerintah dalam mengelola keuangan menuntut adanya sistem perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik adalah menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) dengan dokumen penganggaran (APBD). Ketidakselarasan antar dokumen ini seringkali memicu rendahnya serapan anggaran, tumpang tindih program, hingga ketidaktepatan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari sistem penganggaran tradisional ke arah anggaran berbasis kinerja yang menekankan pada hasil (*outcome*) daripada sekadar input, guna meminimalisir pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas.

Selain aspek perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas kinerja pemerintah juga sangat ditentukan oleh kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Laporan keuangan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Melalui pengawasan yang ketat dan penerapan standar pelaporan yang konsisten, diharapkan pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan, sehingga mampu membangun kepercayaan publik dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Perencanaan dan penganggaran merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan publik. Secara teoretis, perencanaan adalah proses penentuan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, sistem ini diatur untuk menjamin konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan rencana operasional tahunan (RKPD) dan dokumen anggaran (APBD). Teori penganggaran kontemporer menekankan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat manajerial untuk alokasi sumber daya, alat politik untuk negosiasi kepentingan publik, serta alat pengendalian untuk memastikan bahwa setiap belanja pemerintah memiliki landasan hukum dan tujuan pembangunan yang jelas. Ketidakselarasan antar dokumen ini secara teoretis akan menciptakan celah akuntabilitas dan menurunkan efektivitas penyerapan anggaran.

### **Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)**

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah sistem penganggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output* dan *outcome*) dari input yang ditetapkan. Berbeda dengan sistem tradisional yang fokus pada objek belanja (*incremental*), ABK menuntut adanya hubungan yang jelas antara alokasi dana dengan kinerja yang diharapkan. Secara teoritis, ABK didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (*Value for Money*). Implementasi ABK memerlukan instrumen pendukung berupa Standar Analisa Belanja (SAB), Standar Biaya, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Teori ini berasumsi bahwa dengan mengaitkan anggaran pada prestasi kerja, instansi pemerintah akan lebih termotivasi untuk melakukan inovasi layanan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana publik secara transparan.

### **Akuntabilitas Kinerja dan Standar Pelaporan Akuntansi**

Akuntabilitas dalam sektor publik didefinisikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (rakyat). Akuntabilitas kinerja tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana target organisasi tercapai secara kualitas. Untuk mendukung hal ini, diperlukan Standar.

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Secara teoritis, penerapan standar yang konsisten akan

menghasilkan laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, yang menjadi fondasi utama dalam penilaian kinerja instansi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **Teori Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)**

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bersandar pada pilar transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam sistem akuntansi sektor publik, fungsi pengawasan (baik internal oleh Inspektorat maupun eksternal oleh DPRD dan BPK) berperan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa seluruh siklus keuangan berjalan sesuai koridor hukum (compliance). Teori agensi dalam sektor publik menjelaskan bahwa terdapat hubungan kontrak antara rakyat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. Karena adanya potensi benturan kepentingan dan asimetri informasi, maka pengawasan kualitas laporan keuangan menjadi instrumen vital untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan agen. Pengawasan yang efektif secara teoretis akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan tinjauan kritis terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait akuntansi sektor publik. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan, membandingkan, dan mensintesis data dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas tentang mekanisme perencanaan APBD, evaluasi implementasi anggaran berbasis kinerja pada tingkat kementerian/lembaga, serta pengujian empiris mengenai pengaruh standar akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Sumber data mencakup regulasi pemerintah (seperti Perpres No. 29 Tahun 2014) serta studi kasus pada instansi pemerintah daerah dan organisasi kepolisian.

Teknik analisis data dalam kajian ini meliputi analisis komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan antara konsep normatif dengan praktik implementasi di lapangan. Selain mengkaji aspek teoretis, artikel ini juga merujuk pada hasil analisis kuantitatif seperti uji regresi linier berganda dan uji hipotesis parsial maupun simultan untuk memperkuat argumen mengenai hubungan antar variabel dalam pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat efektivitas sistem akuntansi di sektor publik.

Ruang lingkup pembahasan difokuskan pada tiga pilar utama: sistem perencanaan pembangunan daerah, mekanisme pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari studi literatur dan data empiris, penelitian ini berusaha menjembatani celah (research gap) antara teori manajemen keuangan publik dengan realitas operasional di instansi pemerintah. Validitas hasil kajian didukung oleh proses critical review yang mendalam terhadap metodologi dan temuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Sinkronisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

Berdasarkan analisis terhadap siklus kebijakan fiskal daerah, ditemukan bahwa efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat ditentukan oleh derajat koherensi antara dokumen perencanaan makro dan dokumen anggaran operasional. Secara empiris, proses teknokratis yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seringkali mengalami diskoneksi saat memasuki fase politis dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Temuan menunjukkan bahwa ketidaksinkronan ini sering kali disebabkan oleh perubahan prioritas yang mendadak atau intervensi kepentingan tertentu yang tidak terakomodasi dalam rencana strategis jangka menengah.

Padahal, secara normatif, setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus memiliki dasar rujukan pada dokumen perencanaan tahunan guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Lebih lanjut, integrasi sistem informasi pemerintahan daerah (seperti penerapan SIPD) menjadi faktor krusial dalam meminimalisir celah perbedaan antar dokumen. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa daerah yang telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran secara digital memiliki tingkat deviasi anggaran yang jauh lebih rendah.

Sinkronisasi ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan prasyarat utama untuk memastikan bahwa program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

mendapatkan alokasi yang proporsional sesuai dengan mandat regulasi. Tanpa adanya keselarasan yang ketat, anggaran cenderung menjadi instrumen belanja rutin yang kehilangan daya dobrak terhadap sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)**

Transformasi dari sistem penganggaran tradisional ke arah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan ABK di berbagai kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah telah berhasil mengubah orientasi aparatur dari sekadar "menghabiskan anggaran" menjadi "mencapai target kinerja". Namun, pada tingkat operasional, ditemukan hambatan signifikan dalam perumusan indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan dampak (outcome). Seringkali, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya mencantumkan indikator keluaran (output) yang bersifat kuantitatif sederhana, seperti jumlah laporan atau jumlah peserta kegiatan, tanpa mampu menjelaskan bagaimana keluaran tersebut berkontribusi pada pencapaian visi organisasi secara luas.

Analisis lebih mendalam terhadap satuan kerja pada sektor-sektor tertentu, seperti organisasi kepolisian melalui Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), memberikan gambaran bahwa keberhasilan ABK sangat bergantung pada fleksibilitas manajerial dan pemahaman teknis pengelola keuangan. Meskipun struktur organisasi bersifat hierarkis, adanya ruang bagi unit pelaksana untuk merencanakan anggaran berdasarkan kebutuhan riil di lapangan (pendekatan bottom-up) terbukti meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa ABK memerlukan keseimbangan antara kendali pusat (top-down) untuk memastikan kesesuaian visi, dengan partisipasi unit bawah (bottom-up) untuk memastikan ketepatan sasaran operasional dan meminimalisir revisi anggaran di tengah tahun berjalan.

#### **Pengaruh Standar Pelaporan Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Kualitas pelaporan keuangan merupakan manifestasi dari transparansi pemerintah kepada publik. Berdasarkan hasil uji statistik dan analisis kritis dari data penelitian di beberapa daerah, ditemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas kinerja. Informasi akuntansi yang disajikan secara akurat memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai efisiensi biaya program secara lebih mendalam. Laporan keuangan yang memenuhi standar bukan hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban legalitas belanja, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja yang menyediakan data mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah secara komprehensif, sehingga mencegah terjadinya manipulasi data keuangan.

Selain itu, ditemukan bahwa keberhasilan pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah yang tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Implementasi akuntansi sektor publik yang kuat harus dibarengi dengan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Tanpa dukungan sistem pelaporan yang andal, pemerintah akan sulit membuktikan capaian kinerjanya kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan standar pelaporan adalah sebuah keharusan teknis yang berdampak pada stabilitas politik dan kepercayaan sosial terhadap pemerintah daerah.

#### **Sinergi Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Tata Kelola**

Aspek pengawasan kualitas pelaporan keuangan muncul sebagai variabel moderasi yang sangat menentukan dalam mata rantai akuntabilitas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan, baik yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memiliki pengaruh simultan yang sangat besar (mencapai angka 88,7% dalam studi kasus tertentu) terhadap akuntabilitas kinerja. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfokus pada deteksi kecurangan (fraud detection), tetapi juga pada fungsi pendampingan (consulting) untuk memperbaiki kelemahan sistem pelaporan sejak dini.

Hal ini memastikan bahwa laporan yang dihasilkan tidak hanya benar secara angka, tetapi juga tepat secara substansi kinerja. Dinamika pengawasan di tingkat daerah seringkali menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah auditor yang kompeten serta adanya risiko benturan kepentingan. Namun, daerah yang memberikan ruang kemandirian bagi fungsi inspektorat cenderung memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik, yang dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP ini menjadi simbol formalitas keberhasilan tata kelola, namun analisis lebih lanjut menekankan bahwa WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata. Pengawasan yang ketat dan independen memaksa birokrasi untuk tetap berada pada koridor good governance, di mana setiap transaksi harus dapat ditelusuri kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

#### **Tantangan Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi dalam Akuntansi Sektor Publik**

Salah satu temuan krusial dalam pembahasan ini adalah bahwa secanggih apa pun sistem akuntansi dan penganggaran yang diterapkan, keberhasilannya kembali pada faktor manusia (SDM) dan budaya organisasi. Banyak kegagalan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berakar pada rendahnya literasi akuntansi di kalangan pejabat pengelola keuangan dan lemahnya komitmen pimpinan dalam menegakkan aturan. Terdapat kecenderungan di beberapa daerah di mana penyusunan laporan keuangan dianggap sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai kebutuhan strategis untuk perbaikan kinerja.

Hal ini menciptakan budaya kerja yang pasif dan hanya berorientasi pada pemenuhan aspek formalitas hukum demi menghindari sanksi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan investasi pada pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi di bidang akuntansi sektor publik. Selain itu, pimpinan instansi harus menjadi teladan dalam penerapan transparansi anggaran.

Transformasi budaya kerja dari sistem birokrasi yang tertutup menjadi organisasi pembelajar yang transparan akan sangat mendukung efektivitas anggaran berbasis kinerja. Penguatan peran teknologi informasi juga harus dibarengi dengan literasi digital para pegawainya agar sistem informasi keuangan tidak hanya menjadi "gudang data", tetapi menjadi "pusat informasi" yang mendukung pengambilan keputusan manajerial yang cepat dan akurat.

#### **Integrasi Siklus Keuangan sebagai Fondasi Good Governance**

Sebagai sintesis dari seluruh pembahasan, integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban membentuk sebuah siklus tertutup yang menjadi fondasi good governance. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam siklus ini saling mempengaruhi; kegagalan di tahap perencanaan akan mengakibatkan inefisiensi di tahap pelaksanaan, dan ketidakteraturan di tahap pelaksanaan akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabel. Oleh karena itu, pendekatan parsial dalam mereformasi keuangan publik tidak akan efektif.

Reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek regulasi, sistem informasi, pengawasan, dan penguatan nilai-nilai etika publik. Pada akhirnya, tujuan akhir dari akuntansi sektor publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan aspirasi publik, yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan, akan menciptakan sirkulasi kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Dalam jangka panjang, tata kelola keuangan yang terintegrasi ini akan menurunkan tingkat kebocoran anggaran, meningkatkan kualitas infrastruktur publik, dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional maupun daerah secara berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Pengelolaan keuangan sektor publik yang efektif memerlukan integrasi yang kuat antara sistem perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan pelaporan keuangan yang transparan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan merupakan syarat mutlak agar anggaran yang disusun mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pencapaian visi daerah maupun nasional. Tanpa adanya keselarasan dokumen, proses penganggaran akan kehilangan arah dan berpotensi menimbulkan inefisiensi alokasi sumber daya negara.

Implementasi anggaran berbasis kinerja telah membawa perubahan positif dalam budaya organisasi pemerintah ke arah yang lebih akuntabel, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan dan kapasitas aparatur pelaksana. Hasil analisis membuktikan bahwa standar pelaporan akuntansi yang baik tidak akan memberikan dampak optimal terhadap akuntabilitas kinerja jika tidak dibarengi dengan pengawasan kualitas laporan keuangan yang ketat. Oleh karena itu, komitmen pimpinan lembaga menjadi faktor determinan dalam memastikan seluruh rangkaian siklus akuntansi berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan pelatihan berkala bagi aparatur penyusun laporan keuangan guna meningkatkan pemahaman terhadap

standar akuntansi terbaru. Selain itu, diperlukan penguatan studi empiris lebih lanjut dengan memperluas cakupan wilayah penelitian untuk mengidentifikasi tantangan spesifik di berbagai daerah yang berbeda karakteristik. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tata kelola keuangan publik di Indonesia dapat terus meningkat menuju standar internasional yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aquinaldo, T. N., Gheta, A. P. K., & Juru, P. (2024). Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3810-3814.
- Gazali, M. I., Ikbali, I., Pattiasina, V., Agustina, I., & Eljawati, E. (2025). ANALISIS PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD PEMERINTAH. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(2), 2364-2376.
- Khofi, M. Y., Pratama, I. N., Ikram, Nurfajriah, F., Billah, Z. T. S., Ramadani, S., Syaputra, S. K., Muliadi, A., Buahari, & Muliawan. (2025). Evaluasi implementasi anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) terhadap akuntabilitas APBN. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 80–89. E-ISSN 2798-142.
- La'lang, E. S., Supriyono, B., & Amin, F. (2020). Perencanaan dan penganggaran daerah (Studi kasus pada konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran T.A 2020 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(2), 251–260.
- Marlena, V. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus: Bpkd, Inspektorat, Dpmd Dan Dprd Di Provinsi Bengkulu). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(2), 39-49.
- Ulfa, Y. (2024). Analisis Pelaksanaan Anggaran APBN pada Tingkat UAKPA Kementerian dan Lembaga Satuan Kerja Organisasi Kepolisian. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(01), 554-560.